



Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Persekolahan untuk Memperkokoh Rasa Kebangsaan Anak

Hariyanti¹, Irma Irayanti², Gigieh Cahya Permady³, Anif Istianah⁴, Saepudin Karta Sasmita⁵, dan Filma Alia Sari⁶

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau

²Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

³Manajemen Transportasi Laut, Politeknik Pelayaran Sorong

⁴PPKn, Universitas Nusa Cendana

⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

⁶Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau

ABSTRAK. Indonesia merupakan negara multikultural, yang tergambar dari semboyan negara, "bhinneka tunggal ika". Kebhinnekaan tersebut potensial menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila di Persekolahan untuk memperkuat rasa kebangsaan anak. Artikel ini menggunakan metode literature review dalam menganalisis masalah dan mencari solusi. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian mengenai permasalahan terkait. Temuan penelitian menelusuri bahwa Negara majemuk seperti Indonesia (negara kebangsaan) hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormati. Perbedaan hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata dunia jika dikelola dengan baik. Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan perekat yang menyatukan perbedaan dalam realitas sosial yang ada. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan solusi dalam mencegah terjadinya konflik yang dilatarbelakangi oleh keberagaman. PKn sebagai pendidikan multikultural berperan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, yang dikenal sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan bagian integral dalam Pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi membentuk warga negara yang baik, cerdas, toleran, pluralis dan humanis.

Kata Kunci: Pancasila; Multikulturalisme; Rasa Kebangsaan

ABSTRACT. Indonesia is a multicultural country, which is reflected in the national motto, "unity in diversity". This diversity has the potential to cause conflict if not addressed wisely. The aim of this research is to find out Pancasila values in schools to strengthen children's sense of nationality. This article uses the literature review method in analyzing problems and finding solutions through theoretical analysis and research results on related problems. A pluralistic country like Indonesia (a nation-state) can only survive if pluralism is respected. Differences should not be used as a weakness in building Indonesian unity; in fact, it is a social capital that makes Indonesia unique and distinctive in the eyes of the world if managed properly. In Indonesia, shared values are expressed in Pancasila so that Pancasila as the basis and ideology of the state is the glue that unites differences in existing social realities. Citizenship education (PKn) is a solution in preventing conflicts that are motivated by religion. Civics as a multicultural education plays a role in internalizing the values of Pancasila, which is known as the basis and ideology of the state. Pancasila is an integral part of civic education which functions to form good, intelligent, tolerant, pluralist and humanist citizens.

Keyword : Pancasila; Multiculturalism; National Feeling

Copyright (c) 2023 Hariyanti dkk.

✉ Corresponding author : Hariyanti

Email Address : hariyanti@lecturer.unri.ac.id

Received 20 Mei 2023, Accepted 17 September 2023, Published 19 September 2023

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terbesar ke empat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, artinya secara demografis, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data dari badan pusat statistik, penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 diproyeksi sekitar 275 773,8 juta jiwa. Kemudian, Secara geografis, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 17.499 pulau. Luas negara Indonesia sekitar 7,81 juta km², yang terdiri dari 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Artinya, jumlah penduduk tersebut tersebar dalam beberapa pulau, namun penduduk terbanyak berada di pulau Jawa [1].

Selanjutnya, secara sosiologi antropologis, Indonesia merupakan negara kebangsaan yang terdiri dari beragam etnis budaya, Bahasa, agama, kepercayaan hingga kearifan lokal, sehingga juga dikenal sebagai negara multikultural. Namun, keberagaman tersebut, dapat Bersatu padu dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang mampu secara ideologis menangkal gejolak sosial yang dilatarbelakangi keberagaman tersebut. [2], [3]. Keberagaman tersebut tergambar secara apik dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dapat dibayangkan, bagaimana yang kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang cukup padat di tengah perbedaan sosial yang terbentang baik dari segi suku, etnis, budaya, bahasa hingga agama. Kebhinnekaan tersebut potensial menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak oleh bangsa Indonesia. Konflik horizontal seperti yang terjadi di Madura tahun 2002 dan Poso tahun 1999 merupakan contoh konflik yang ditunggangi oleh kepentingan politik dengan menyeret isu perbedaan agama sehingga menimbulkan *chaos* yang berujung jatuhnya korban jiwa. Negara majemuk seperti Indonesia (negara kebangsaan) hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormati. Perbedaan hendaknya tidak dijadikan kelemahan dalam membangun persatuan Indonesia justru merupakan modal sosial yang menjadikan negara Indonesia bersifat khas dan unik di mata dunia jika dikelola dengan baik

Keberagaman yang dimiliki Indonesia jika disikapi dengan bijak maka akan menjadi satu kelebihan yang dipandang oleh dunia internasional sebab keberagaman sering dilihat sebagai sumber konflik dan disintegrasi bangsa. Namun, sejauh ini, Indonesia telah mampu membuktikan pada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang mendiami negara Indonesia masih bersatu di tengah perbedaan dalam realitas sosial [4]. Hal tersebut terjadi sebab Indonesia yang multicultural dipersatukan oleh rasa kebangsaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Suseno rasa kebangsaan Indonesia masih kuat, buktinya masih eksis hingga saat ini [5]. Tidak seperti uni Soviet dan Yugoslavia, yang mempersatukan Indonesia adalah kesadaran sebagai satu bangsa dan ini bukan sesuatu yang alami melainkan tekad untuk bersama yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bersama yakni sejarah penderitaan dan penindasan mencapai kemerdekaan. Kalau semangat dan tekad ini menguap maka yang tersisa hanya kelompok-kelompok etnik.

Rasa kebangsaan Indonesia begitu terlihat jelas dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, dalam Keberagaman agama yang begitu dihormati di Indonesia bahkan negara memfasilitasi dan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 [6], [7]. Selain, negara juga memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena setiap orang memiliki hak untuk diakui dan dihormati sebagai manusia yang bermartabat serta untuk menjamin persatuan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia [8], [9]. Nilai Pancasila dapat ditanamkan pada anak sejak usia dini melalui metode permainan yang menyenangkan dan karyawisata. Berupa Kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap sopan santun dan berperikemanusiaan, rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, menumbuhkan jiwa demokratis dan rasa keadilan, kejujuran, kebenaran dan menolong orang lain [10].

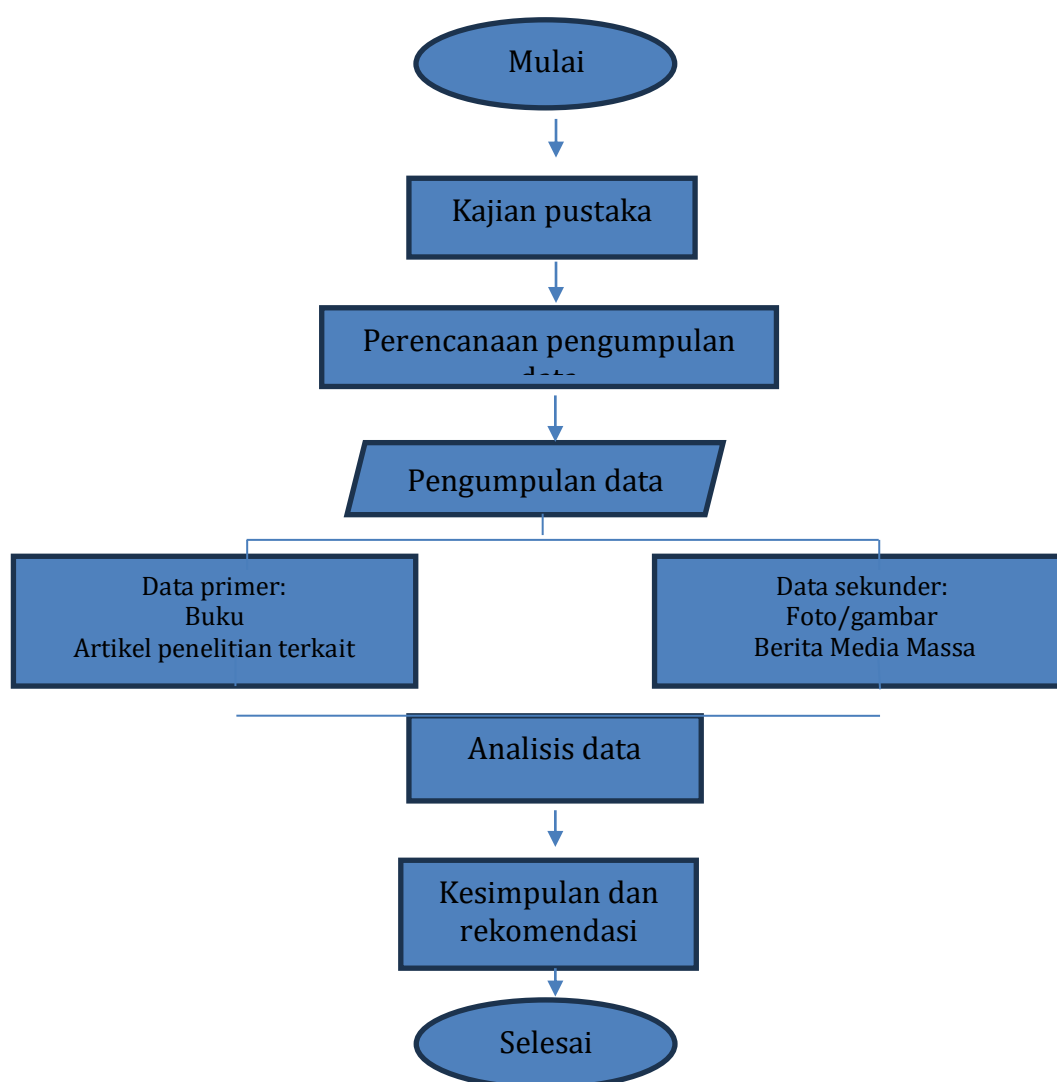
Jadi, Pancasila sebagai ideology negara merupakan perekat dalam keberagaman sosial. Pancasila merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang serba beraneka ragam itu, suatu konsensus nasional yang mampu menggalang dan menjamin persatuan bangsa menuju terwujudnya cita-cita bersama masyarakat adil dan Makmur [11], [12]. Maka merupakan kewajiban bagi segenap warga negara untuk meresapi dan menghayati nilai-nilai Pancasila agar dalam segala dimensi kehidupannya agar tidak terjebak oleh perasaan kedaerahan yang picik atau dikenal dengan primordialisme ataupun merasa kabur dengan kebudayaan dan rasa kebangsaan karena pengaruh globalisasi. PKN sebagai pendidikan multikultural berperan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman suku bangsa sehingga mampu melahirkan masyarakat yang toleran bahkan menjadikan keberagaman sebagai potensi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia [13].

Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam Pancasila sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideology negara merupakan perekat yang menyatukan perbedaan dalam realitas sosial yang ada. Pancasila merupakan bagian integral dalam Pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi membentuk warga negara yang baik, cerdas, toleran, pluralis dan humanis. Namun, saat ini muncul indikasi mudarnya praktik nilai-nilai Pancasila yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan generasi muda yang mencerminkan lemahnya karakter bangsa, seperti meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi dan nepotisme, radikalisme, kejahatan seksual, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya [14], [15]. Sementara di lingkungan Pendidikan, mudarnya nilai Pancasila dapat dilihat dari maraknya kasus perundungan yang terjadi di persekolahan, masih tingginya angka tawuran pelajar maupun Tindakan kejahatan yang melibatkan pelajar seperti kasus pelecehan seksual [16][17]. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi secara lebih jauh mengenai tantangan terhadap rasa kebangsaan di tengah tarikan primordialisme dan globalisme dalam perspektif pemikiran Romo Frans Maginis Suseno serta peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina dan meningkatkan rasa kebangsaan

peserta didik di tengah tarikan isu primordialisme dan pengaruh globalisme yang mulai memudahkan perasaan nasionalisme dan loyalitas kebangsaan.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen seperti buku, artikel penelitian, berita di media massa, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik lainnya yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.



Gambar 1: Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasan ini mengacu kepada pendapat yang menarik dari Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Kebangsaan Dan Etika Kemanusiaan. Terdapat 4 tantangan terhadap

rasa kebangsaan yakni: Pertama, Globalisasi. Globalisasi seakan-akan membuat batas-batas negara tidak berarti. Kita seakan-akan menjadi warga dunia. Makin kita mempunyai uang, makin kita dapat secara nyata menjadi warga dunia. Kenyataan ini mempertanyakan relevansi negara kebangsaan. Kedaulatannya semakin menjadi mitos. Globalisasi di bidang ekonomi berarti maju mundurnya perekonomian suatu daerah di dunia ditentukan oleh perekonomian seluruh dunia. Apa yang diproduksi di suatu tempat bisa ditawarkan dimanapun. Para pelaku raksasa perekonomian kontemporer yang menentukan aliran produk ekonomi dan aliran keuangan sudah membentuk jaringan yang mengitari seluruh dunia. Kedua, Kepingan perasaan kedaerahan. Yang dimaksud disini bukan separatism melainkan bahwa otonomi daerah yang baru merangsang nafsu para putera daerah untuk menguasai semua tempat basah, syukur kalaupun untuk memajukan daerah, namun sering juga hanya untuk memperkaya diri pribadi. Mereka bisa kehilangan wawasan dan perasaan solidaritas kebangsaan dan tanggung jawab mereka.

Ketiga, System ekonomi kapitalistik yang materialistic. System ekonomi kapitalistik materialistic melahirkan *hedonism* yakni paham yang menjadikan kesenangan dan kemewahan sebagai tujuan hidup. Hedonisme menjurus pada sikap konsumerisme yakni kebutuhan untuk terus membeli yang baru dalam arti materi untuk memenuhi kebutuhan psikisnya. Ada dua segi yang gawat pada konsumerisme. *Pertama*, orang akan kehilangan kepedulian sosial. Ia begitu asyik terus mengikuti dorongan untuk membeli yang lebih baru lagi sehingga ia tidak lagi merasakan bahwa ada saudara-saudari yang kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Bahkan lebih dari itu, orang-orang miskin lama-kelamaan akan dirasakan sebagai gangguan. Kehadiran mereka seakan-akan mengganggu wellnessnya, haknya atas kebahagiaan, haknya untuk menikmati segala apa yang ditawarkan secara menggiurkan. *Kedua*, Konsumerisme melahirkan kekerasan sosial. Akibat yang tak kalah fatal menyangkut kepribadian orang yang terkena konsumerisme. Ia menjadi terasing dari dirinya sebenarnya. Ia semakin termanipulasi, yang ia kejar bukan lagi apa yang betul-betul dibutuhkannya, bukan apa-apa yang sungguh-sungguh diminatinya, melainkan yang disugestikan kepadanya oleh industry promosi sebagai kebutuhan, sebagai minat, yang diminati bukan lagi apa yang betul-betul bernilai secara sosial tetapi yang bernilai inderawi—melainkan agar ia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi trendnya. Secara otomatis nilai-nilai yang melampaui wellness erdesak ke luar dari perhatian. Ia menjadi seorang hedonis egosentrik. Rasa solidaritas termasuk dengan bangsanya akan tergerogoti. Kebangsaan tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti baginya dan negara semakin menjadi sekedar lembaga yang bertugas untuk menyediakan segala macam fasilitas, tetapi tanpa hak atas loyalitas apalagi atas pengorbanannya.

Keempat, Ideology-ideologi totaliter. Alam psikis ideology-ideologi totaliter adalah lawan seratus persen terhadap mental konsumistik. Orang yang mengikuti sebuah ideology mempunyai perasaan bahwa ia mengikuti cita-cita luhur, bahwa hidupnya menjadi penuh arti. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ideology-ideologi sama saja merupakan alat manipulasi dan mengasingkan orang yang mengikutinya dari dirinya sendiri dan dari kebutuhan dan perasaan-perasaan yang sebenarnya. Kelompok-

kelompok ideologis yang ekstrem menimbulkan perpecahan karena mengklaim mempunyai kebenaran mutlak telah mengancam hakekat kebangsaan serta merusak harkat etis dan kemanusiaan kehidupan bersama masyarakat.

Globalisasi merupakan sebuah tantangan, tidak hanya bagi rasa kebangsaan tetapi juga dari segi perekonomian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, globalisasi telah menciptakan pasar bebas, dimana hambatan jarak dan pembatasan dalam perdagangan antar negara diminimalisir sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Di Indonesia, kita mengenal MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk dapat bersaing dengan SDM dari negara lain yang bebas masuk dan bekerja di Indonesia. Jika hal ini tidak disikapi dengan baik maka akan menjadi sumber disintegrasi karena ketidapuasan warga negara terhadap kebijakan tersebut, perasaan diperlakukan tidak adil karena tidak mampu bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan dengan warga negara lain di negeri sendiri dapat menimbulkan gejolak di masyarakat yang cenderung berujung pada *chaos*. Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil sebab persoalan “perut” seringkali memancing emosi. Globalisasi harus disikapi dengan bijak dan perlu persiapan peningkatan SDM yang kompetitif dan berdaya saing agar mampu memanfaatkan kelebihan yang ditawarkan globalisasi bukan menjadi sumber disintegrasi dan membahayakan solidaritas kebangsaan.

Hubungan antara pusat dan daerah cenderung bersifat fluktuatif, masalah dominan yang menjadi sebab musabab pola hubungan yang seperti ini adalah masalah ketidakadilan dan ketidakpuasan rakyat di daerah [18]. Fakta ketidakadilan antar daerah, dimana daerah kaya tidak pernah bisa menikmati hasil kekayaannya (hasil) alamnya menjadi kenyataan kongkret yang cenderung mengarah kepada disintegrasi. Hal dikarenakan kekecewaan rakyat di daerah karena pola pembagian hasil dari SDA yang tidak adil. Sejarah membuktikan bahwa rasa ketidakpuasan seperti ini pernah memunculkan gerakan separatis PRRI PERMESTA tahun 1958-1959 di beberapa daerah. Kejadian seperti ini tentu mengancam rasa kebangsaan yang telah dipupuk dan dijaga selama ini. Gerakan Reformasi tahun 1998 melahirkan kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, namun kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah lain yang tak kalah pelik. Otonomi daerah memunculkan raja-raja kecil di daerah. Otonomi daerah malah menjadi bahan banjakan untuk korupsi di daerah serta secara lebih jauh mengancam integrasi karena umumnya perasaan kedaerah menjadi lebih kental saat pemilihan pejabat-pejabat di daerah, yang diutamakan dan diberi privilege khusus adalah para putera daerah. Indonesia adalah negara yang besar dan multicultural, pengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan daerah bukanlah suatu hal yang buruk karena sense of belonging terhadap tanah kelahiran (primordialisme) pasti ada dalam setiap sanubari warga negara namun jangan menjadikan hal tersebut sebagai penghalang bagi orang lain yang lebih mampu untuk berkarya walaupun bukan asli putera daerah yang bersangkutan. Perasaan primordialisme yang mengarah kepada disintegrasi harus dibuang jauh demi tegaknya NKRI.

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Dan Meningkatkan Persatuan.

Berdasarkan pemaparan mengenai tantangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu wadah yang digunakan untuk menumbuhkan dan membentuk jiwa nasionalisme sejak dini melalui jenjang pendidikan, hal ini terlihat dari konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan [19], [20]. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam semua jenjang pendidikan. hal ini dilakukan mengingat tujuan essensial dari PKn yakni untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Pendidikan multikultural merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebab Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan perbedaan menonjol dari segi ras, agama, bahasa dan suku bangsa. Inilah yang menjadi potensi terjadinya disintegrasi jika di dalam setiap diri warga negara tidak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nasionalisme dan kekhasan keberagaman yang terdapat di Indonesia [21]. Untuk mewujudkan PKn yang mampu membina peserta didik menjadi pribadi yang toleran terhadap perbedaan dan demokratis dalam menyikapinya serta meningkatkan rasa kebangsaan peserta didik di tengah-tengah perbedaan dalam hubungan sosial, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama **Strategi**. Strategi yang perlu dibangun adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan. contohnya, untuk mengenalkan nilai-nilai kebudayaan yang khas dari setiap daerah serta untuk meningkatkan kecintaan peserta didik dengan budaya dan tanah kelahirannya, guru PKn di sekolah ketika mengajarkan materi-materi yang terkait dengan hal tersebut dapat mengajak siswa untuk berkunjung ke museum-museum. Namun, kunjungan ini tidak perlu mengurangi bahkan mengganggu jam pelajaran PKn. Guru dapat menggunakan hari-hari yang sekiranya tidak mengganggu peserta didik dan kegiatan sekolah lainnya seperti pulang sekolah di hari jum'at, biasanya jam PBM dipersingkat dan kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru PKn yang dapat bekerjasama dengan guru mata pelajaran lainnya, tentunya dengan terlebih dahulu memberikan waktu untuk peserta didik laki-laki muslim mengerjakan sholat jum'at. Kegiatan kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan peserta didik dengan nilai-nilai kebudayaan lokal dan menanamkan rasa kecintaan terhadap keunikan tanah kelahiran masing-masing di tengah kemajemukan yang ada. Secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air [22].

Kedua **Metode dan Media**. Sekolah merupakan tempat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme karena sekolah mempunyai waktu, sarana dan prasarana serta tanggung jawab moral untuk mendidik dan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang cerdas secara kognitif, bermoral, demokratis serta menjadi pribadi yang toleran secara afektif, tangkas serta multitalenta secara psikomotor [23]. Contohnya, guru dapat melakukan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau studi kasus konflik-konflik yang berbau SARA di Indonesia. Menurut penulis, diskusi seputar masalah SARA di Indonesia bukanlah sesuatu yang tabu dan dihindari melainkan harus diperkenalkan dan diberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kemajemukan Indonesia karena konflik SARA umumnya dilatarbelakangi oleh sikap primordialisme yang picik dan stereotip yang kesemuanya ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pengetahuan terhadap kemajemukan pada umumnya dan keunikan masing-masing budaya pada khususnya [24]. Jika kesepahaman tercapai maka bukan tidak mungkin sikap toleransi seperti yang diharapkan akan terwujud dalam masyarakat yang multicultural dan plural [25]. Selain itu, diskusi kelompok dengan mencampurkan yang berbeda dari segi suku dan etnis hingga agama dalam proses pembelajaran di kelas merupakan metode yang efektif untuk membina hubungan komunikasi yang sehat di antara siswa-siswa. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah ketika akan memulai pelajaran, guru memulai dengan membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik melalui nyanyian lagu-lagu kebangsaan secara bersama-sama.

Ketiga, **Materi**. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multiKultural di sekolah selaras dengan misi pendidikan kewarganegaraan yakni untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Pendidikan multicultural bukan dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi dalam sector pendidikan seperti yang terjadi di Amerika Serikat melainkan sebaliknya bertujuan untuk mempererat dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan sosial yang ada dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman dan pluralitas yang hidup di Indonesia [26]. Menurut Suseno pluralism merupakan kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas, kesediaan untuk menerima kenyataan dalam masyarakat bahwa ada cara hidup, budaya dan keyakinan agama yang berbeda serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja sama serta membangun negara bersama [27]. Tujuan utama penerapan pendekatan pendidikan multikultural di tingkat nasional hendaknya dititikberatkan pada pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap budayanya sendiri dan budaya orang lain, mencakup agama, berlandaskan semboyan bhinneka tunggal ika serta Pancasila. Untuk itu maka diperlukan adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama dengan memasukkan muatan materi keanekaragaman nilai-budaya, didukung oleh penelitian sosiologis dan antropologis untuk pendidikan. kemajemukan di

Indonesia yang telah mampu hidup berdampingan secara damai merupakan sebuah keunikan yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia [28].

Menurut Affandi persoalan serius yang sering menggoda munculnya disintegrasi bangsa adalah soal pemahaman masyarakat tentang toleransi. Dalam banyak kasus toleransi digambarkan sebagai keharusan mayoritas memahami keberadaan minoritas [29]. Memahami akan adanya pluralism sebetulnya masih bisa dipahami sebagai toleransi. Tapi ketika toleransi dipaksakan agar mayoritas tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena demi toleransi terhadap minoritas, cepat atau lambat toleransi seperti ini berubah menjadi kontraproduktif. Berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 menjadi semakin penting. Sebab keduanya secara historis telah teruji mampu menjembatani berbagai perbedaan, termasuk perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dinamika sosial adalah kelaziman yang tidak harus dihindari. (mengelola konflik). Kemajemukan tersebut tercipta karena dipersatukan oleh satu konsensus nasional yakni Pancasila [30], [31]. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi panduan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sangat perlu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada diri siswa dalam rangka meningkatkan karakter dan nilai moral anak negara. Moralitas dan kepribadian adalah perbedaan nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia itu sendiri, masyarakat, lingkungan, dan negara yang dapat diwujudkan dalam pikiran, perkataan, tindakan, sikap, dan emosi berdasarkan aturan dan norma yang telah ditetapkan [32]. Pancasila merupakan bagian integral dari materi pokok yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Inilah inti dari pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang Pancasila. Materi pokok ini harus senantiasa ditekankan bahkan diinfiltrasikan setiap materi di RPP, walaupun bukan dalam bentuk satu indikator tersendiri, melalui keteladanan dan pemberian contoh pada peserta didik dalam setiap kehidupan sudah merupakan hal yang baik bagi perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural berperan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman suku bangsa sehingga mampu melahirkan masyarakat yang toleran bahkan menjadikan keberagaman sebagai potensi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuan utama penerapan pendekatan pendidikan multikultural di tingkat nasional hendaknya dititikberatkan pada pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap budayanya sendiri dan budaya orang lain, mencakup agama, berlandaskan semboyan *bhinneka tunggal ika* serta Pancasila. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan hadir sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan toleransi, tenggang rasa, serta persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan tersebut. Melalui Pendidikan kewarganegaraan dengan tawaran konsep strategi, media, metode serta materi yang bertumpu pada kebhinnekaan dalam keikaan diharapkan makin memperkuat semangat persatuan warga negara.

PENGHARGAAN

Penulis bertutur kasih yang tinggi kepada pihak yang telah berbagi informasi, sehingga dengan informasi-informasi tersebut penulis bisa menyatukannya menjadi sebuah karya yang cacat kesempurnaan ini. Selanjutnya terimakasih pula kepada pengelola Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang telah menjadikan tulisan ini menjadi nyata dihadapan pembaca.

REFERENSI

- [1] A. R. Pratama, S. Sudrajat, and R. Harini, "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia Tahun 2018," *Media Komun. Geogr.*, vol. 20, no. 2, p. 101, Dec. 2019, doi: 10.23887/mkg.v20i2.19256.
- [2] H. Ahmad Eddison, Hambali, "Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Pancasila Pada Guru MGMP PPKn SMA / SMK," *JCES J. Character Educ. Soc.*, vol. 6, no. 1, pp. 2–10, 2023, doi: 10.31764/jces.v6i1.10556.
- [3] H. Hariyanti, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Peserta Didik Di Persekolahan," *J. Pendidik. kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, pp. 60–68, 2022, doi: 10.23887/jpku.v10i2.46796.
- [4] L. Agustriani *et al.*, "Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Permainan Kerjasama Tim kepada Anak-anak," *Bubungan Tinggi J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 1, p. 150, Apr. 2022, doi: 10.20527/btjpm.v4i1.4765.
- [5] D. Darsono, "Penetrasi Kapital dan Bangkitnya Nasionalisme Etnis di Indonesia," *J. ILMU Sos. dan ILMU Polit.*, vol. 1, no. 2, p. 61, Dec. 2021, doi: 10.30742/juispol.v1i2.1786.
- [6] H. Hariyanti and G. C. Permady, "Pengembangan Nilai Religious Peserta Didik," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 285–294, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52050>
- [7] S. Fitriani, "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Anal. J. Stud. Keislam.*, vol. 20, no. 2, pp. 179–192, Dec. 2020, doi: 10.24042/ajsk.v20i2.5489.
- [8] B. Zaman, "Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa ndonesia," *AL GHAZALI, J. Kaji. Pendidik. Islam dan Stud. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 16–31, 2019, [Online]. Available: https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/101
- [9] D. Sundawa and L. B. Wadu, "Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 6, no. 2, pp. 77–82, Dec. 2021, doi: 10.21067/jmk.v6i2.6488.
- [10] M. A. Alaby, "Urgensi Nilai Pancasila pada Anak Usia Dini," *J. Teach. Educ.*, vol. 4, no. 3, pp. 102–111, 2023, doi: 10.31004/jote.v4i3.12074.
- [11] A. Eddison, H. Hambali, and H. Haryanti, "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Pada Guru Ppkn SMA/SMK Kota Dumai," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3, pp. 993–1005, 2020, doi: 10.23887/jpku.v9i3.40431.
- [12] G. K. Pakpahan, I. Salman, A. B. Setyobekti, I. S. Sumual, and A. M. Christi, "Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah radikalisme," *KURIOS*, vol. 7, no. 2, pp. 435–445, Oct. 2021, doi: 10.30995/kur.v7i2.351.
- [13] V. Novaroza, H. Hambali, and H. Hariyanti, "Pengaruh Pembelajaran PKN terhadap Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Universitas Riau," *J. Educ.*, vol. 5, no. 3, pp.

- 9370–9379, Feb. 2023, doi: 10.31004/joe.v5i3.1744.
- [14] M. A. Alaby, “Membumikan Nilai Pancasila pada Generasi Bangsa,” *Gema Wiralodra*, vol. 10, no. 2, pp. 179–190, Nov. 2019, doi: 10.31943/gemawiralodra.v10i2.75.
 - [15] D. Anggraini, F. Fathari, J. W. Anggara, and M. D. Ardi Al Amin, “Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial,” *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 2, no. 1, p. 11, Apr. 2020, doi: 10.33474/jisop.v2i1.4945.
 - [16] W. Theodore and S. Sudarji, “Faktor-Faktor Perilaku Perundungan pada Pelajar Usia Remaja di Jakarta,” *Psibernetika*, vol. 12, no. 2, pp. 67–79, Feb. 2020, doi: 10.30813/psibernetika.v12i2.1745.
 - [17] S. W. Rahmawati, “Peran Iklim Sekolah terhadap Perundungan,” *J. Psikol.*, vol. 43, no. 2, p. 154, Jun. 2016, doi: 10.22146/jpsi.12480.
 - [18] Y. Pradana and K. Komalasari, “Aktualisasi Warga Global yang Humanis,” *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKn*, vol. 10, no. 1, pp. 1–11, May 2023, doi: 10.36706/jbti.v10i1.19938.
 - [19] R. Raharjo, “Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020,” *PKn Progresif J. Pemikir. dan Penelit. Kewarganegaraan*, vol. 15, no. 1, p. 63, Jun. 2020, doi: 10.20961/pknp.v15i1.44901.
 - [20] A. Eddison, H. Hambali, and H. Hariyanti, “Peranan Modal Sosial pada MGMP PPKN dalam Membentuk Kompetensi Guru di Kota Pekanbaru,” *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKn*, vol. 8, no. 2, pp. 105–115, Nov. 2021, doi: 10.36706/jbti.v8i2.15606.
 - [21] S. R. Yanti, H. Hambali, and H. Hariyanti, “Studi Perbandingan Pembentukan Civic Disposition Antara Siswa Laki-Laki dan Perempuan pada Pembelajaran PKN di SMP Negeri 2 Lirik,” *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 4, pp. 6658–6668, 2022, doi: 10.31316/jk.v6i4.4226.
 - [22] S. Paranita, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Z dalam Mewujudkan Good Citizenship di Perguruan Tinggi Islam,” *Civ. Educ. Soc. Sci. J.*, vol. 4, no. 1, p. 35, Jun. 2022, doi: 10.32585/cessj.v4i1.2574.
 - [23] D. R. Hartadi, D. A. Dewantoro, and A. R. Junaidi, “Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar,” *J. ORTOPEDAGOGIA*, vol. 5, no. 2, p. 90, Nov. 2019, doi: 10.17977/um031v5i22019p90-95.
 - [24] A. M. A. Shofa, “Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai pancasila,” *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, vol. 1, no. 1, pp. 34–41, 2016, doi: 10.24269/v1.n1.2016.34-40.
 - [25] M. A. Ma'arif, “Internalisasi Nilai Multikultural Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi (Studi Di Di Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Malang),” *Nazhruna J. Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 164–189, Mar. 2019, doi: 10.31538/nzh.v2i1.179.
 - [26] S. Alim, “Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila,” *Dakwah J. Kaji. Dakwah dan Kemasyarakatan*, vol. 23, no. 2, pp. 85–99, 2019, doi: 10.15408/dakwahv23i213938.
 - [27] Y. F. Ali, “Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama,” *Untirta Civ. Educ. J.*, vol. 2, no. 1, Apr. 2017, doi: 10.30870/ucej.v2i1.2804.
 - [28] D. Nurhidayah, E. S. Aisyah, and J. Nurjannah, “PKn dalam Kurikulum 2013,” *JPPHK (Jurnal Pendidik. Polit. Huk. Dan Kewarganegaraan)*, vol. 10, no. 1, pp. 1–13, 2020,

- [Online]. Available: <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/937>
- [29] E. Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *J. Bimas Islam*, vol. 12, no. 2, pp. 323–348, Dec. 2019, doi: 10.37302/jbi.v12i2.113.
- [30] M. Abror, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi," *RUSYDIAH J. Pemikir. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 137–148, Dec. 2020, doi: 10.35961/rsd.v1i2.174.
- [31] D. L. Pitaloka, D. Dimiyati, and E. Purwanta, "Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 2, pp. 1696–1705, Jan. 2021, doi: 10.31004/obsesi.v5i2.972.
- [32] S. P. Wanda, Nurjanah, Dr. Elan, M.Pd, dan Budi Rachman, "Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Abstrak," *JMECE J. Mod. Early Child. Educ.*, vol. 02, no. 1, p. pp.15-19, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/JMECE/article/view/509>